

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



BAPPEDA KOTA SIBOLGA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) adalah Laporan berupa evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditetapkan selama satu tahun. Laporan disusun menjadi satu dokumen yang memuat uraian rinci tentang tingkat capaian kegiatan dan sasaran serta realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sistematika penyusunan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan kebijakan strategis tahun berikutnya. Juga untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja dan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasinya pada tahun berikutnya.

Kinerja Bappeda Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Sibolga ini.

SIBOLGA, MARET 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SIBOLGA,



Drs. JUNEIDI TANJUNG, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650531 198803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel.....	IV
Daftar Gambar.....	VI
Lampiran	VII
Ikhtisar Eksekutif	VIII
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Bappeda Kota Sibolga	2
1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah	2
1.2.2 Struktur Organisasi	3
1.2.3 Sumber Daya Aparatur	5
1.2.4 Prasarana dan Sarana Kerja.....	8
1.3 Isu – Isu Strategis.....	17
1.4 Dasar Hukum	20
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	22
Bab II Perencanaan Kinerja	24
2.1 Rencana Strategi	24
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024.....	27
2.3 Strategi dan Kebijakan.....	31
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	33
Bab III Akuntabilitas Kinerja	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	43
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	47
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	48
3.1.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan	

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	49
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	50
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
3.2 Realisasi Anggaran	67
Bab IV Penutup.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Pegawai Bappeda Kota Sibolga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024.....	5
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai Bappeda Kota Sibolga berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024	7
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai Bappeda Kota Sibolga berdasarkan Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Tahun 2023 ...	7
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Bappeda Kota Sibolga Berdasarkan Diklat Jabatan Tahun 2024	8
Tabel 1.5	Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2024.....	8
Tabel 1.6	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Sibolga.....	17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Bappeda Tahun 2021 s/d 2025 Bappeda Kota Sibolga.....	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Utama (IKU) Pelayanan Bappeda...	30
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	31
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Eselon II Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024	33
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Eselon III (Sekretaris) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolgs Tahun 2024.....	34
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Eselon IV Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolgs Tahun 2024	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	47
Tabel 3.1.2	Realisasi Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2022 dan 2023 dengan Tahun 2024	48
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	49

Tabel 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	57
Tabel 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	58
Tabel 3.1.7 Penghargaan Yang dicapai BAPPEDA Kota Sibolga	66
Tabel 3.2 Ringkasan Program, Anggaran dan Sumber Dana Dalam Menunjang Kinerja Bappeda Kota Sibolga	67
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga	3
Gambar 1.2	Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Gender.....	5
Gambar 1.3	Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Pendidikan..	6

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. Cascading Renstra
3. Rencana Aksi 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sibolga adalah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kota Sibolga yang berfungsi sebagai perencana pembangunan melalui upaya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bootom-up approach*) dengan kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Siboga Tahun 2024 sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan ini yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, *efectif* dan *responsive* terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja sebagai sasaran memperlihatkan bahwa indikator kinerja utama yang dilaksanakan Bappeda rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan persentase yang memuaskan tetapi masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Secara Umum capaian sementara Nilai Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Sibolga sebesar **77,97 %** dan capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 diperoleh rata-rata nilai sebesar **90,75 %** kategori sangat Tinggi dan Realisasi keuangan **74,57 %** dengan kategori sedang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal Tahun Anggaran 2024 juga sebagai bahan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.

Proses penyusunan LKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA SIBOLGA

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Serta Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga adalah sebuah instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Sibolga.

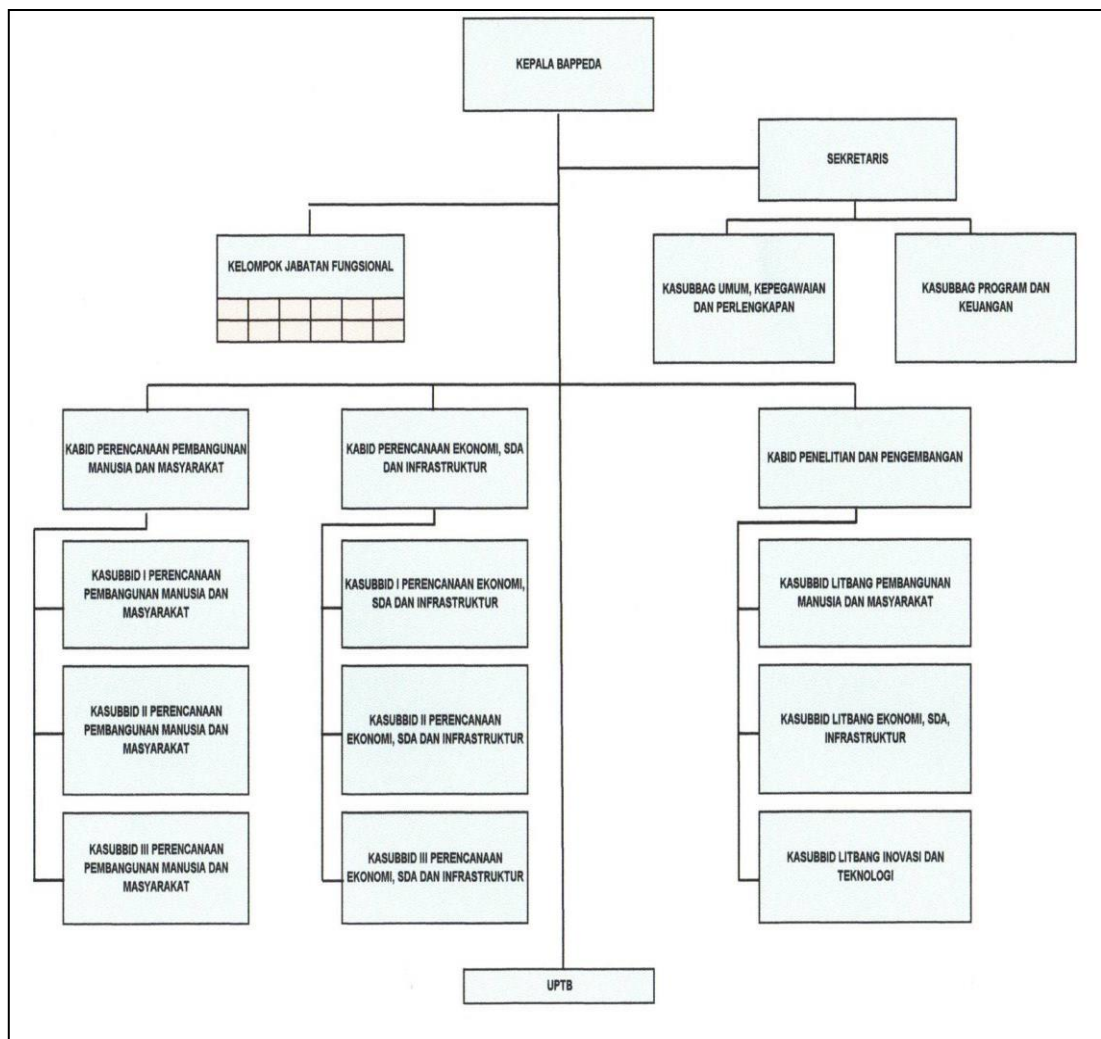
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 21 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala badan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan struktur Bappeda Kota Sibolga



KEDUDUKAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah /Subbagian Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari:
 1. Perencana Ahli Muda / Subbidang I Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 2. Perencana Ahli Muda /Subbidang II Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
 3. Perencana Ahli Muda /Subbidang III Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; terdiri dari:
 1. Perencana Ahli Muda /Subbidang I Perencanaan Ekonomi,

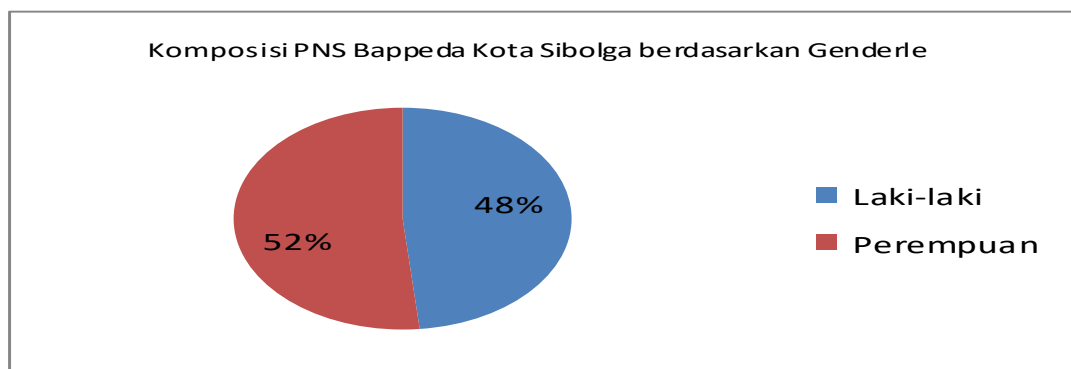
- Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- 2. Perencana Ahli Muda /Subbidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- 3. Perencana Ahli Muda /Subbidang III Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Perencana Ahli Muda / Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - 2. Perencana Ahli Muda /Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
 - 3. Peneliti Ahli Muda /Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

1.2.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Sibolga didukung oleh 31 PNS, dengan perimbangan jumlah PNS laki – laki sebanyak 15 orang (48%) dan perempuan 16 orang (52%).

Untuk membantu ASN dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Sibolga dibantu oleh 3 Orang PPPK dan 9 (Sembilan) orang tenaga harian lepas (THL). Adapun uraian tugas THL tersebut diantaranya: petugas administrasi 8 orang , petugas kebersihan 1 orang

Gambar 1.2
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Gender Tahun 2024



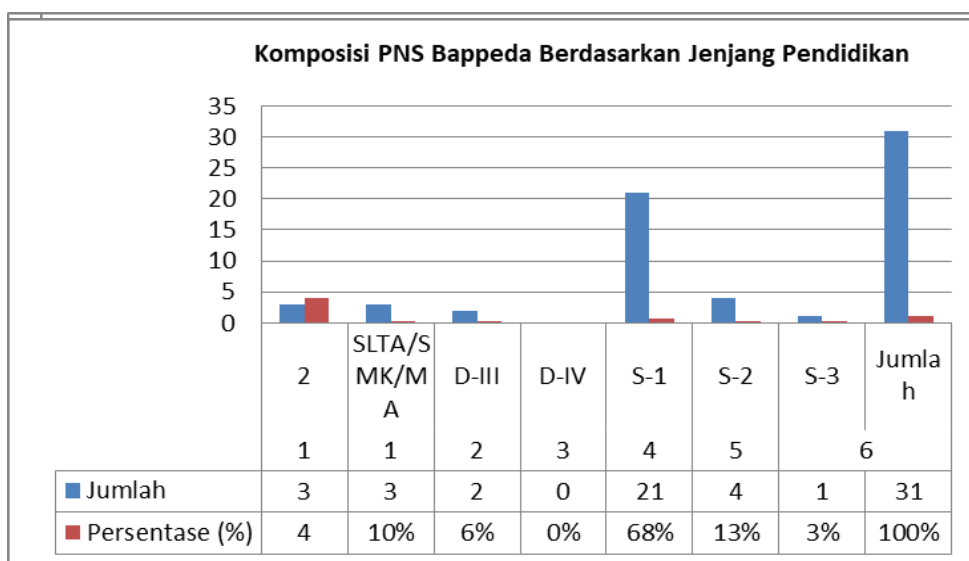
Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (68%). Selanjutnya adalah jenjang pendidikan S-2 sebanyak 4 orang (12%), S-3 sebanyak 1 orang (3%) Diploma III sebanyak 2 orang (6%) SLTA sebanyak 3 orang (10 %) .

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tahun 2023	Kualifikasi Pendidikan Formal	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	SLTA/SMK/MA	3	10%
2	D-III	2	6%
3	D-IV	0	0%
4	S-1	21	68%
5	S-2	4	13%
6	S-3	1	3%
	Jumlah	31	100%

Sumber : Bappeda Kota Sibolga, 2024

Gambar 1.2
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Untuk jenjang pangkat dan golongan pegawai Bappeda Kota Sibolga yang tertinggi adalah Golongan IV/c sebanyak 1 orang (3%) dan terendah adalah Golongan II/d.sebanyak 2 orang (6%) Sedangkan jumlah pangkat dan golongan terbanyak adalah Golongan III/d sebanyak 11 orang (35%).

Tabel 1.2
Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan
Tahun 2024

	Golongan	Pangkat	Jumlah	Persentase (%)
	2	3	4	5
S m e	IV/c	Pembina Utama Muda	1	3 %
	IV/b	Pembina TK. I	2	6%
	IV/a	Pembina	6	19%
	III/d	Penata TK. I	11	35%
	III/c	Penata	2	6%
	III/b	Peñata Muda TK. I	4	13%
	III/a	Penata Muda	3	10%
	II/d	Pengatur TK . I	2	6%
	JUMLAH		31	100 %

D

Sumber Data :Bappeda Kota Sibolga, 2024

Untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional di BAPPEDA Kota Sibolga Tahun 2024, seperti pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Kondisi Pegawai berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Jabatan
Fungsional Tahun 2024

No	Kualifikasi	Jumlah ASN	
		Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional
1	2	3	4
1	Eselon II A	1	0
2	Eselon II B	0	0
3	Eselon III A	1	0
4	Eselon III B	3	0
5	Eselon IV A	2	8
6	Eselon IV B	0	0
	Jumlah	7	8

Sumber : Bappeda Kota Sibolga, 2024

Untuk eselonering aparatur Bappeda Kota Sibolga, terdiri dari 7 jabatan struktural dan 8 Jabatan Fungsional.

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Bappeda Kota Sibolga Berdasarkan Diklat Jabatan Tahun 2024

KLASIFIKASI		PNS		JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1		2	3	4 (2 + 3)
Pendidikan Penjejeangan	Diklatpim II	1	-	1
	Diklatpim III	1	3	4
	Diklatpim IV	4	4	8
	JUMLAH	6	7	13

Sumber: Data Diolah, Kepegawaian Bappeda, 2024

1.2.4 Prasarana dan Sarana Kerja

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappeda Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5

Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
I	Ruang Kepala Badan Bappeda					
1.	Lemari kayu	Lemari	1	Unit		1

No	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
		Gantung				
2.	Lemari kayu	Lemari Arsip	1	Unit	1	--
3.	Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet	1	Unit	1	--
4.	Penghancur kertas	Krisbow S290	1	Unit	1	-
5.	Meja Kerja Besi / Mental	Gorden	1	Unit	-	1
6.	Meja Kerja Besi / Mental	Gorden	1	Unit	-	1
7.	Kursi Tamu	Kursi Tamu	1	Unit	1	-
8.	AC. Spilit	LG	1	Unit	1	-
9.	Televisi	TV 40 Inci	1	Unit	1	-
10.	Layar Film / Proyektor	Infokus	1	Unit	1	-
11.	Laptop	Lenovo	2	Unit	2	-
	Bidang Sekretariat					
12.	Reciber	Reciver	1	Unit	-	1
13.	Lemari Kayu	Lemari gantung	1	Unit	-	1
14.	Lemari Kayu	Lemari gantung	1	Unit	-	1
15.	Lemari Kayu	Lemari gantung	1	Unit	-	1
16.	Lemari Kayu	Lemari gantung	1	Unit	-	1
17.	Lemari Kayu	Lemari gantung	1	Unit	1	-
18.	Lemari Kayu	Lemari gantung	1	Unit	1	-
19.	Filing Cabinet besi	Yunika	1	Unit	-	1
20.	Filing Cabinet besi	Unital	1	Unit	-	1
21.	Filing Cabinet besi	Yunika	1	Unit	1	-
22.	Mesin Absensi	Mesin Absensi	1	Unit	-	1
23.	Mesin Absensi	MesinFinger	1	Unit	-	1
24.	Meja kerja Besi/ Metal	Gorden	1	Unit	-	1

No	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
25.	Meja kerja Besi/ Metal	Gorden	1	Unit	-	1
26.	Meja kerja Besi/ Metal	Gorden	1	Unit	-	1
27.	Meja kerja kayu	Kursi Kerja	1	Unit	1	-
28.	Meja kerja kayu	Kursi Kerja	1	Unit	1	-
29.	Kursi rapat	Chitose	1	Unit	1	-
30.	Kursi rapat	Chitose	1	Unit	1	-
31.	Kursi Putar	Topix	1	Unit	-	1
32.	Kursi Putar	Topix	1	Unit	-	1
33.	Kursi Putar	Topix	1	Unit	-	1
34.	AC Spilit 2 PK	LG	2	Unit	2	-
35.	Alat Dapur lainnya	Dispenser	1	Unit	-	
36.	Camera Video	Tdk ditemukan	1	Unit	-	1
37.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Meja Kerja	6	Unit	-	6
38.	Kursi Kerja Eselon II	Kutsi Kerja	2	Unit	-	2
39.	Layar Film/ Projector	Infokus	1	Unit	1	-
40.	Printer	Printer	3	Unit	3	-
41.	Lemari kayu gantung	Lemari Gantung	1	Unit	-	1
42.	Filing Cabinet besi	Feeling Kabinet	1	Unit	1	-
43.	Alat Penghancur kertas	Penghancur kertas	1	Unit	1	-
44.	Meja biro	1 Biro	1	Unit	1	-
45.	Kursi tamu	Kursi Tamu	1	Set	1	-
46.	AC. Split	2 PK	1	Unit	1	-
47.	Televisi	40 inci	1	Unit	1	-
48.	Layar film/ Projector	infokus	1	Unit	1	-
49.	Kursi kerja pejabat eselon II	Meja kerja	3	Unit	3	-
50.	Kursi kerja Eselon III	Kayu	2	Unit	2	-
51.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	Kayu	1	Unit	1	-
52.	Meja Kerja ½ Biro	Kayu	15	Unit	15	-
53.	Layar Film/ Projector	Proyektor	1	Unit	1	-
54.	Facsimile	Mesin Fax	1	Unit	1	-
55.	Scanner Facsimile	Scanner	1	Unit	1	-
56.	Screen Pembatas	Partisi (Pembatas	1	Unit	1	-

- No .	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
		Ruangan				
57.	P.C Unit	Komputer	3	Unit	3	-
58.	Lap top	Lap top	6	Unit	6	-
59.	Printer	Peralatan personal komputer	9	Unit	9	-
60.	External	Hard Drive External	2	Unit	2	-
	RUANG BENDAHARA					
61.	Lemari Kayu	Lemari gantung	2	Buah	-	2
62.	Lemari Kayu	Lemari arsip	1	Buah	1	-
63.	Filing cabinet besi	Filing kabinet	1	Buah	1	-
64.	Brandkas	Brandkas	1	Buah	1	-
65.	Alat penghancur kertas	Mesin penghancur kertas	1	Buah	1	-
66.	Meja kerja besi/ Metal	Meja	2	Buah		2
67.	Meja kerja kayu	Meja kerja	1	Buah	1	-
68.	Meja ½ Biro	Meja 1Biro	1	Buah	1	-
69.	A.C Window	AC 1 PK	2	buah	1	1
70.	Alat dapur lainnya	Dispenser	1	Buah	1	-
71.	Stabilisator	UPS/ STABILIZER	3	Buah	2	1
72.	Camera Vidio	Drone Camera	1	Buah	1	-
73.	Meja kerja pejabat eselon II	Meja kerja	5	Buah		5
74.	P.C Unit	Komputer/ PC 3 in 1	2	Buah	2	-
75.	Lap top	Lap top	5	Buah	4	1
76.	Lap top	Notebook/ Laptop	1	Buah	1	
77.	Printer (Peralatan personal komputer)	Printer	3	Buah	3	-
78.	Printer (Peralatan personal komputer)	Printer scan A3	1	Buah	1	

No	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
79.	Peralatan personal komputer lainnya	Printer	1	Buah		1
80.	Peralatan personal komputer lainnya	Printer scan A3	1	Buah	1	-
	BIDANG ESI					
81.	Global positioning system	Alat ukur GPS	2	Buah	2	-
82.	Global positioning system	GPS	1	Buah		1
83.	Lemari kayu	Lemari gantung	1	Buah		1
84.	Lemari kayu	Lemari arsip	2	Buah	2	-
85.	Filing cabinet besi	Filing cabinet	1	Buah		1
86.	Peta	Peta Kel. 120 X 80 + Bingkai	21	Buah	21	-
87.	Peta	Peta Kota 150 X 120 + Bingkai	28	Buah	28	-
88.	Peta	Peta Kelurahan 120 X 80	17	Buah	17	
89.	Peta	Peta Kelurahan 130 X 90	4	Buah	4	-
90.	Meja kerja besi/ Metal	Meja kerja	3	Buah		3
91.	Meja kerja kayu	Meja kerja	2	Buah	2	-
92.	Meja ½ Biro	Meja biro	1	Buah	1	-
93.	Kursi Rapat	Kursi Rapat (Chitose)	7	Buah	7	-
94.	Kursi putar	Kursi putar beroda	1	Buah		1
95.	A.C. Window	AC 1 PK	1	Buah	1	-
96.	A.C. Split	AC 2 PK	1	Buah	1	-
97.	Dispenser	Dispenser	1	Buah		1

- No .	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
98.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Kursi kerja	1	Buah		1
99.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Kursi Kerja Eselon III	2	Buah	1	1
100	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	Almari Arsip	2	Buah		2
101	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	Lemari Arsip 2 Pintu	1	Buah	1	-
102	Mainframe (Komputer jaringan)	Komputer Mainframe/ Server/ Pengaman besi jerajak	1	Buah	1	-
103	P.C Unit	Komputer	2	Buah	2	-
104	Lap Top	Laptop/ Notebook	2	Buah		2
105	Lap Top	Lap top	2	Buah	2	-
106	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	6	Buah	5	1
107	Peralatan Personal komputer lainnya	USP/ Stabilizer	2	Buah	2	-
108	Server	Server	1	Buah	1	-
	AULA BAPPEDA					
109	Lemari kayu	Lemari Arsip	1	Unit	1	-
110	Rak besi	Rak Mixer	1	Unit	1	-
111	Meja kerja besi/ Metal	Gorden	2	Unit	-	2
112	Kursi kayu	Kursi kayu biasa	1	Unit	-	1
113	Meja rapat	Meja rapat	1	Unit	-	1
114	Meja ½ biro	Meja ½ biro	7	Unit	6	1
115	Kursi Rapat	Kursi Rapat (Chitose)	12	Unit	10	2
116	Kursi putar	Kursi putar beroda	1	Unit		1
117	A.C. SPLIT	AC 2 pk	2	Unit	2	-

- No .	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
118	Alat dapur lainnya	Mixer	1	Unit	1	-
119	Loudspeaker	Speaker	2	Unit	2	-
120	Stabilisator	Stabilizer	1	Unit	1	-
121	Kursi kerja Pejabat Eselon V	Kursi kerja	15	Unit	14	1
122	Microphone/ Wireless MiC	Tidak di temukan mix kabel	2	Unit	-	2
123	Layar film/ Projector	Infokus	1	Unit	1	-
124	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	3	Unit	3	
	BIDANG PMM					
125	Lemari kayu	Lemari arsip	1	Buah	1	-
126	Meja kerja kayu	Meja kerja	1	Buah	1	-
127	Meja ½ biro	Meja kerja	2	Buah	1	-
128	Kursi rapat	Kursi rapat	4	Buah	4	
129	Kursi putar	Kursi putar beroda	1	Buah	-	1
130	A.C.Sentral	AC	1	Buah	1	-
131	Dispenser	Dispenser	1	Buah	1	-
132	Meja kerja pejabat Eselon II	Meja kerja	2	Buah	-	2
133	Kursi kerja pejabat Eselon II	Kursi kerja	1	Buah	-	1
134	Lemari arsip untuk arsip dinamis	Lemari arsip 2 pintu	1	Buah	1	-
135	Layar film/ Projector	Layar proyektor	2	Buah	2	-
136	P.C Unit	Komputer PC 3 in 1	1	Buah	1	-
137	Lap top	Lap top/ Notebook	2	Buah	1	1
138	Lap top	Lap top	3	Buah	1	2

No	Nama barang	Spesifikasi Nama Barang	Total	Satuan	Baik	Rusak
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	1	Buah	1	-
140	External	Hard Drive External	2	Buah	2	-
	BIDANG LITBANG					
141	Lemari kayu	Lemari gantung	1	Buah	-	1
142	Lemari kayu	Lemari arsip	2	Buah	2	-
143	Meja kerja besi/ Metal	Gorden	3	Buah		3
144	Meja kerja kayu	Meja kerja	2	Buah	2	
145	Meja ½ biro	Meja ½ biro	1	Buah	1	-
146	Kursi rapat	Kursi rapat	4	Buah	4	
147	Kursi putar	Kursi putar beroda	1	Buah	-	1
148	A.C.Sentral	AC	1	Buah	1	-
149	Camera vidio	Kamera profesional	1	Buah	1	-
150	Meja kerja pejabat Eselon II	Meja kerja	2	Buah	-	2
151	Meja kerja pejabat Eselon III	Meja kerja	1	Buah	1	-
152	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	Lemari arsip 2 pintu	4	Buah	4	-
153	P.C Unit	Komputer/ PC	1	Buah	1	-
154	Lap top	Lap top	3	Buah	2	1
155	Hard Disk	Hardist Eksternal	2	Buah	2	-
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	5	Buah	3	2

Sumber: Bappeda Kota Sibolga Tahun 2024

Untuk Tahun 2024 pengadaan sarana prasarana di Bappeda Kota Sibolga Tidak ada di tampung dalam Anggaran Tahun 2024 dan sarana prasarana di Bappeda sudah banyak yang rusak sehingga perlu di

anggarkan untuk pengadaan yang baru karena baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil kinerja.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bappeda dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappeda Kota Sibolga

Aspek Kajian (1)	Capaian/ Kondisi Saat ini (2)	Standar yang Digunakan (3)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan (6)
			Internal (4)	Eksternal (5)	
Gambaran pelayanan OPD.	Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan.	- UU No. 25 Tahun 2004 - PP No. 8 Tahun 2008 - Permendagri No.86 tahun 2017 - UU 23 Tahun 2014 - PP 18 Tahun 2016	- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja - Kecermatan Verifikasi - Kemampuan Aparatur Perencana - Kejelasan arahan unsur Pimpinan Bappeda - Koordinasi Antar Bidang/Sub Bidang	- Pemahaman Stakeholder akan arti penting perencanaan - Perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS - Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD Provsu - Informasi kebijakan dari pemerintah dan	- Belum optimalnya hasil perencanaan - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan

				Pemerintah Sumatera Utara	
				• Ketepatan dan Kecermatan Data dan Usulan	
	• Penyediaan data statistik.	• UU No.14 Tahun 2008 • PP No.61 Tahun 2010 • Perpres No. 39 Tahun 2019 • Permendagri No. 70 Tahun 2019	• Kecermatan aparatur • Kejelasan arahan unsur Pimpinan Bappeda • Ketersediaan SIM Data Statistik Daerah.	• Akurasi dan Ketepatan waktu data OPD dan BPS • Ketersediaan Data Base SKPD • Konsistensi data.	• Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date • Data belum bisa diakses secara mudah oleh <i>stakeholders</i>.
• Kajian terhadap Renstra OPD Bappeda Provsu.	• Koordinasi dengan Bappeda Provsu • Pelaporan ke Bappeda Provsu • tepat waktu.	• UU No. 25 Tahun 2004 • PP No. 8 Tahun 2008 • Permendagri No.86 tahun 2017.	• Koordinasi Antar Bidang/Sub Bidang.	• Keterbatasan informasi mengenai dana APBD Provsu	• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
• Kajian terhadap Renstra Kementerian PPN/ Bappenas.	• Kesesuaian produk perencanaan dengan peraturan di atasnya.	• UU No. 25 Tahun 2004 • PP No. 8 Tahun 2008 • Permendagri No.86 tahun	Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundangan.	• Informasi kebijakan dari pemerintah pusat.	1. Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik

		2017 •Permendagri 90 Tahun 2019			BPS. 2. Perubahan kode rekening dan nomenklatur OPD
• Kajian terhadap fungsi kelitbangan dan inovasi daerah	• Belum optimalnya fungsi litbang dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah	• UU No. 18 Tahun 2002 • UU No 11 Tahun 2019 • PP No. 38 Tahun 2017	• Masih lemahnya fungsi bidang litbang • inovasi dan daya saing daerah masih rendah • Belum adanya fungsional peneliti	• Kebijakan anggaran belum memadai tentang Litbang • Nomenklatur baru yang harus dilaksanakan per Agustus 2020	3. Masih lemahnya fungsi kelitbangan dalam perencanaan dan kebijakan daerah

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kota Sibolga Tahun 2024 adalah

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- h. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodevikasi, dan Nomenklatur Perencananaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);
- j. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Sibolga yang di dalamnya terdapat Struktur Organisasi;

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kota Sibolga Tahun 2023 ini di susun berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini di sajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran, strategis, organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Pohon Kinerja
3. Cascading

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

RPJMD Kota Sibolga merupakan dokumen landasan atau acuan pokok Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Perda Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode lima Tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan Strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda Kota Sibolga yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. maka Bappeda Kota Sibolga juga membawa VISI: **“MEWUJUDKAN SIBOLGA YANG SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR ”**

Pernyataan visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sedangkan dalam mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel;

2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan, sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas menuju masyarakat yang makmur.

3. Mewujudkan pemerataan Pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastuktur kota

4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi di

5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan Kewirausahaan serta menialin keriasama dengan pelaku

adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dalam mendukung pencapaian misi pertama yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (RPJMD). Misi dalam RPJMD yang menjadi titik berat program pembangunan di Bappeda adalah **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel**

Birokrasi Pemerintahan daerah tidak saja menitik beratkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan, pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan Pemerintahan yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan Daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja Pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Renstra Bappeda mengacu pada misi nomor satu yaitu : **Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel** dengan

target pencapaian pada tujuan satu Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Transparan dan Akuntabel.

Dengan demikian dapat di lihat permasalahan utama yang dihadapi Bappeda adalah:

- 1.** Penerapan sistem manajemen mutu melalui peningkatan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana prasarana aparatur dan peningkatan kualitas SDM;
- 2.** Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah;
- 3.** Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;
- 4.** Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja
- 5.** Daya saing daerah masih termasuk kategori rendah dan perlu didukung untuk melakukan riset dan inovasi.

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. dan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Bappeda Kota Sibolga yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program yang ada di Bappeda Kota Sibolga dan juga Merupakan Penjabaran atau implementasi dari pada misi yang akan dicapai dan kurun waktu tertentu, biasanya satu sampai lima tahun kedepan. Gambaran organisasi yang dikehendaki dapat dirumuskan dengan melihat dan mempertimbangkan secara rinci antara lain jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, orang – orang yang akan menangani pekerjaan, beban atau volume pekerjaan dalam konteks pencapaian tujuan lima tahun kedepan. Sesuai dengan Renstra Bappeda Kota Sibolga mengacu kepada Misi kesatu RPJMD dengan target pencapaian pada **tujuan satu** ; Menerapkan Tata kelola Pemerintah Good Governace dengan Transparan dan Akuntabel.

Selanjutnya tujuan tujuan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam tujuan jangka menengah Bappeda Kota Sibolga yang terdiri dari 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
2. Peningkatan kelitbangan dengan Inovasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka lima Tahun kedepan. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja Bappeda. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi kesatu. Berdasarkan analisa diatas, maka Bappeda Kota

Sibolga harus bekerja keras mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran secara terus menerus, sehingga hasil yang dicapai yang masih bersifat abstrak akan tergambar dalam angka-angka yang melahirkan sejauh mana tujuan dapat dicapai.

Dengan demikian, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

TABEL 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Bappeda Tahun 2021 s/d 2025 Bappeda Kota Sibolga.

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguna serta Kelitbangan dengan Inovasi	1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase Perencanaan Pembangunan	90%	96%	98%	100%	100%
		2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90%	95%	95%	99%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	AA	AA	AA	AA	AA
		3	Meningkatnya fungsi Kelitbangan	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kota Inovatif	Kota Inovatif	Kota Inovatif	Kota Inovatif	Kota Inovatif

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI UTAMA (IKU) PELAYANAN BAPPEDA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target	Keterangan
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Serta Kelitbangan dengan Inovasi	1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase Perencanaan Pembangunan	100%	1. $\frac{\text{Jumlah Program RPJMD}}{\text{Jumlah Program Renstra}} \times 100$ 2. $\frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program Renja}} \times 100$
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}}$
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	AA	Penilaian atas akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Kota Sibolga
		3	Meningkatnya Fungsi Kelitbangan	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kota Inovatif	$\frac{\text{(Jumlah Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan / Jumlah Inovasi Yang Diusulkan)} \times 100\%}{1}$

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan, aturan, arahan, acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah digariskan melalui Visi dan Misi Bappeda Kota Sibolga.

Untuk mewujudkan tujuan seperti yang disebutkan diatas, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur			
Misi I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik <i>Good Governance</i> dengan Transparan dan Akutansi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan Kelitbangan dengan Inovasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif melalui fungsi perencanaan dan monev	Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan sesuai RPJMD
		Meningkatnya Pelayanan publik dan akses informasi	Peningkatan pelayanan publik dan akses informasi yang transparan dan akuntabel.
		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan	Keikutsertaan aparatur dalam diklat teknis dan fungsional sesuai jabatan

		Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan yang akurat melalui fungsi validasi dan verifikasi data	Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data
	Meningkatnya Fungsi Kelitbangan dan Inovasi	Pembentukan forum-forum konsultasi publik dalam perumusan kebijakan publik	Pembentukan forum konsultasi dalam rangka perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.
		Melakukan implementasi Sistem Inovasi daerah pada Program-program unggulan dan non unggulan daerah serta pengembangan kawasan.	Mengimplementasikan IPTEKIN dalam : a. Peningkatan produktivitas, kualitas serta daya saing dan secara khusus pada produk perikanan. b. Mengembangkan Ekosistem inovasi;
		Meningkatkan kualitas SDM dalam menghasilkan laporan hasil kelitbangan	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kelitbangan
		Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, perlu dijabarkan strategi serta arah kebijakan dalam pencapaian target kinerja pelayanan Bappeda Kota Sibolga. Kedua sasaran tersebut diterjemahkan kedalam 8 (delapan) strategi dan untuk mempermudah penyusunan arah kebijakan yang komprehensif.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja Dan Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai suatu target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada rencana strategis Bappeda Kota Sibolga Tahun 2021-2026 dan Sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Bappeda Kota Sibolga dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut di ukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Sibolga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Eselon II
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Sibolga Tahun 2024

NO	BAGIAN/ BIDANG	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	89,36%	94,06%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	AA	BB	79,16%
3		Meningkatnya fungsi Kelitbangan	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kota Inovati f	Kota Inovatif	38,64
		Rata-Rata Capaian Kinerja (Tinggi)				77,97%

Sumber data Renstra tahun 2021-2026

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Eselon III (Sekretaris)
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Sibolga tahun 2024

No	Bagian/bidang	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sekretaris	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	89,36%	94,06%
			2. Jumlah Laporan Surat Masuk dan Keluar	1 Laporan	100%	100%
			3. Jumlah Laporan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024	1 Laporan	100%	100%
			4. Jumlah Laporan Pengadministrasian Barang Inventaris Milik Daerah	2 Laporan	100%	100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen RKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Bidang Perencanaan Ekonomi, SDA Dan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Dokumen Renja yang Terakomodir dalam RKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja						100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan manusia dan masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan dan terbitnya Perkada Germas	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan dan Terbitnya Perkada Kota Layak Anak	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan dan Terbitnya Perkada Kota Sehat	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan dan Terbitnya Perkada TBC	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan dan Terbitnya Perkada Pengarus Utamaan Gender (PUG)	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan dan Terbitnya Perkada Stunting	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan dan Terbitnya Perkada Kemiskinan	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan HAM	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan Ketahanan Pangan dan Gizi	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Jumlah Dokumen Laporan SDGs	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya Capaian Rencana Induk Kelitbangan, SiDA dan Perhitungan Indeks Kelitbangan	Jumlah Dokumen IPKD	1 Doku men	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen Kajian Pariwisata	1 Doku men	1 Dokumen	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Eselon IV Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Sibolga tahun 2024

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah /Sub Bagian Program Dan Keuangan	Tersusunnya dokumen RKPD, RKA/RKPA dan DPA/ DPPA	Jumlah Dokumen RKPD2025 dan RKA/RKPA 2025 dan DPA/DPPA 2025	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen evaluasi Renstra dan Renja 2025	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersedianya Dokumen LkjIP, LPT, LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LKjIP 2025, LPT 2025, LPPD 2025, dan LKPJ 2025	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Terlaksananya laporan urusan tata laksana	Jumlah Laporan urusan tata laksana keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%

		keuangan				
		Terlaksananya laporan Perbendaharaan dan gaji	Jumlah Laporan Perbendaharaan dan gaji	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Terlaksananya laporan verifikasi dan akuntansi	Jumlah Laporan verifikasi dan akuntansi	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Tersedianya laporan keuangan	Jumlah Dokumen laporan keuangan 2025	12 Laporan	12 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja						100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya kualitas tata usaha, tata laksana dan kearsipan	Jumlah Kinerja Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Tersusunya RKBM	Jumlah Dokumen RKBM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Inventaris	Jumlah Kinerja Pemeliharaan barang Inventaris	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Tersusunnya laporan Inventaris Barang	Jumlah Laporan Inventaris barang	12 laporan	12 laporan	100%
		Tersedianya laporan LHKPN	Jumlah Laporan LHKPN	1 laporan	1 laporan	100%
		Terlaksananya laporan LHKPN	Jumlah Pegawai Laporan LHKPN	5 Pegawai	5 Pegawai	100%
		Terlaksananya laporan IKM	Jumlah Laporan IKM	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Rata-Rata Capaian Kinerja			

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Perencana Ahli Muda / Subbid I	Tersedianya Dokumen RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD.P	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Perencanaan Ekonomi, SDA Dan Infrastruktur	dan RKPD.P				
	Terlaksananya koordinasi tentang pelaporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 dan 2024	Jumlah Laporan RKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Terlaksananya kegiatan Musrenbang di Pemerintah Kota Sibolga	Jumlah Berita Acara Musrenbang	3 Berita Acara	3 Berita Acara	100%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kota Sibolga	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga	1 laporan	1 laporan	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Perencana Ahli Muda / Subbid II Perencanaan Ekonomi, SDA Dan Infrastruktur	Tersedianya jumlah rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup bidang infrastruktur Dinas PUPR dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Infrastruktur PUPR dan Perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersedianya jumlah laporan DAK	Jumlah Laporan DAK	6 laporan	6 laporan	100%
		Tersedianya Jumlah laporan Usulan Perencanaan DAK	Jumlah laporan Usulan Perencanaan DAK	1 laporan	1 laporan	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Perencana Ahli Muda /Subbid III Perencanaan Ekonomi, SDA Dan Infrastruktur	Tersedianya jumlah rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup bidang infrastruktur Dinas PUPR dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Infrastruktur PUPR dan Perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersedianya jumlah laporan DAK	Jumlah Laporan DAK	6 laporan	6 laporan	100%
		Tersedianya Jumlah laporan Usulan Perencanaan DAK	Jumlah laporan Usulan Perencanaan DAK	1 laporan	1 laporan	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
6	Perencana Ahli Muda / Subbid I Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Tersedianya Dokumen laporan SDGs	Jumlah Dokumen SDGs	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersedianya Dokumen Laporan Ketahanan Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Ketahanan Pangan dan Gizi	2 Laporan	2 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja						100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
7	Perencana Ahli Muda /Subbid II Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Germas Kota Sibolga Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah Dokumen PUG	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Germas, Kota Sehat dan Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen Germas	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
8	Perencana Ahli Muda / Subbid III Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Terlaksananya Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Kota Sibolga	Jumlah Dokumen Hak Azasi Manusia (HAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya laporan Penurunan Stunting	Jumlah Dokumen Penanggulangan dan Pencegahan Stunting Kota Sibolga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terlaksananya Penanggulangan kemiskinan di Kota Sibolga	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) di kota Sibolga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
9	Perencana Ahli Muda /Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Terlaksananya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	Jumlah Laporan DBH Sawit	1 laporan	1 laporan	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja						100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
10	Perencana Ahli Muda /Sub Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi , SDA Dan Infrastruktur	Terlaksananya Penelitian Kelitbangan di Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur	Jumlah Laporan Dokumen DBHCT	2 Laporan	2 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja						100%

No	Bagian/bidang	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
11	Perencana Ahli Muda /Sub Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Baik	Sangat Baik	100%

	Inovasi dan Teknologi					
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Bappeda Kota Sibolga yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja. Pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2023 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Bappeda Kota Sibolga tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan instansi pemerintah bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Bappeda Kota Sibolga juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Sibolga Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja *output* yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD. Agar pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat lebih terukur maka dituangkan ke dalam indikator-indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran-sasaran tersebut dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka gunakan rumus pendek.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017		

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Persentase Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	Bidang ESI
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	2. Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	89,36%	94,06%	Bagian Sekretariat
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	AA	BB	79,16%	Bagian Sekretariat
3	Meningkatnya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	4. Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kota Inovatif	Kota Inovatif	38,64%	Bidang Litbang
Rata-Rata Capaian Kinerja Sementara					77,97%	
Skala Peringkat					Tinggi	

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.2
Realisasi Kinerja Target dan Realisasi Kinerja
Antara Tahun 2022 dan 2023 dengan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Tahun 2022	Tahun 2023	CAPAIAN 2024		
				Realisasi	Realisasi	TARGET	REALISASI	%
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.	Persentase Perencanaan Pembangunan	96%	98%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	2.	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,57%	88,50%	95%	89,36%	94,06%
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	A	A	AA	BB	79,16%
2	Meningkatnya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	4	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Inovatif	Kurang Inovatif	Kota Inovatif	Kota Inovatif	38,64%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.1.3

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.	Persentase Perencanaan Pembangunan	98%	100%	98%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	2.	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50%	95%	95%
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	A	AA	A
2	Meningkatnya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	4	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kurang Inovatif	Kota Inovatif	Kota Inovatif

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Ke- gagalan	Solusi Yang Dilakukan
			TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	6	7	8		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Persentase Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	Keberhasilan : Motivasi antara sesama OPD untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Pemerintahan Daerah Kota Sibolga	
						Kegagalan : 1. Tidak mengikuti kerangka acuan kerja 2. Kurang profesionalnya SDM perencanaan	1. Memahami masalah 2. Kolaborasi kerjasama antara OPD yang satu dengan yang lain 3. Penguatan Kapasitas melalui pelatihan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi Yang Dilakukan
			TARGET	REALISASI	%		
							Bimtek
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	2. Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	89,36%	94,06%	Keberhasilan : 1. IKM dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public 2. IKM dapat menjadi bahan penilaian untuk memperbaiki pelayanan yang masih kurang 3. IKM dapat mendorong unit	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi Yang Dilakukan
				TARGET	REALISASI	%		
							penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan	
							Kegagalan : 1. Kurangnya keseriusan responden tentang pentingnya IKM 2. Kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan pelayanan 3. Kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan	1. Peningkatan literisasi digital 2. Pengembangan SDM 3. Pengembangan infrastruktur
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	AA	BB	79,16%	Keberhasilan : 1. Peningkatan kualitas SAKIP dapat	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi Yang Dilakukan
			TARGET	REALISASI	%		
						dirasakan masyarakat melalui proses pelayanan public 2. Peningkatan kualitas SAKIP dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan peningkatan pendapatan per kapita 3. Peningkatan kualitas SAKIP dapat berdampak pada peningkatan kualitas, infrastruktur dan indeks pembangunan manusia	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi Yang Dilakukan
				TARGET	REALISASI	%		
							Kegagalan : 1. Kurangnya komitmen dari Pemerintah Daerah, Lembaga dan Kementerian 2. Sanksi yang tidak tegas bagi instansi Pemerintah yang tidak menerapkan SAKIP 3. Keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas kinerja	1. Melakukan sosialisasi, dan Bimtek kepada instansi Pemetintah pusat maupun daerah 2. Melakukan evaluasi LAKIP untuk menilai kualitas implementasi SAKIP dan kinerja instansi Pemerintah 3. Memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja instansi berjalan dengan efektif dan efisien.
3	Meningkatnya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	4	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kota Inovatif	Kota Inovatif	38,64%	Keberhasilan : 1. Mendapatka n penghargaan IGA sebagai	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi Yang Dilakukan
			TARGET	REALISASI	%		
						apresiasi Pemerintah terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah dengan cara inovatif 2. Inovasi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung pembangunan berkelanjutan	
						Kegagalan : 1. Takut mengambil resiko 2. Kurangnya komunikasi internal	1. Membentuk tim untuk membina dan mendampingi inovasi 2. Meningkatkan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN 2024			Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi Yang Dilakukan
				TARGET	REALISASI	%		
								koordinasi dan sosialisasi 3. Melakukan coaching clinic 4. Memberikan penghargaan kepada ASN dan masyarakat yang berprestasi 5. Mengadakan lomba inovasi dan teknologi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sementara						77,97%		
Skala Peringkat						Tinggi		

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
				TARGET	REALISASI	%	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian	
1	2	3		6	7	8				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1.	Persentase Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	409.437.200	260.084.866	63,52%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	2.	Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%	89,36%	94,06%	5.329.919.320	4.006.978.832	75,18%	
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	AA	BB	79,16%				
2	Meningkatnya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	4	Predikat Innovative Government Award (IGA)	Kota Inovatif	Kota Inovatif	38,64%	256.545.700	197.125.899	76,84	

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.1.6

Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2		8					
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase Perencanaan Pembangunan	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator kota terhadap pembangunan	100.00%	Menunjang	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase usulan masyarakat yang ditampung di APBD	100.00%	Menunjang	
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Berita Acara</i>		Menunjang	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100%	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pembangunan Daerah	<i>yang ditetapkan RPJPD/ RPJMD/ RKPD</i>			
				Program Koordinasi Dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program kegiatan yang ada di RPJMD ke dalam Dokumen RKPD	75.00%	Menunjang	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia		Menunjang	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	100 %	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian kegiatan bidang perekonomian dan SDA	50.00%	Menunjang	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	50.00 %	Menunjang	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Persentase Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda (SAKIP)	94,06%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88 %	Menunjang	
			79,16%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90,42%	Menunjang	
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93,75%	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.00%	Menunjang	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	100.00%	Menunjang	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	100.00%	Menunjang	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100.00%	Menunjang	
				Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	100.00%	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100.00%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00%	Menunjang	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	100.00%	Menunjang	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	100.00%	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
					Disediakan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00%	Menunjang	
				Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61,67%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yag	100.00%	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan di bayarkan Pajaknya			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	00,00%	Menunjang	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 %	Menunjang	
3	Meningkatnya fungsi Kelitbangan dan Inovasi	Predikat Innovative Government Award (IGA)	38,64%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase capaian Rencana Induk Kelitbangan, SIDA dan perhitungan indeks	100.00%	Menunjang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan		Menunjang	
				Penelitian dan pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Hasil penelitian dan pengembangan Pariwisata	100%	Menunjang	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi Pembangunan		Menujang	
				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen Hasil penelitian dan pengembangan Penataan ruang dan Pertanahan	100%	Menunjang	
Total						90,75%		

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja program dan kegiatan Bappeda Kota Sibolga Tahun 2024 90,75% (sangat tinggi) dimana seluruh target kinerja hampir dapat terealisasi.

2. Pencapaian Kinerja Lainnya

Pencapaian atas kinerja lainnya merupakan prestasi yang tidak pernah dijadikan sebagai indikator oleh Bappeda, namun atas upaya bersama yang dilakukan oleh Bappeda untuk Pemerintah Kota Sibolga menjadikan Kota Sibolga mendapatkan beberapa penghargaan seperti tabel 3.1.7 berikut ini:

Tabel 3.1.7

Penghargaan yang di capai Bappeda Kota Sibolga

No.	Tahun	Penghargaan yang di terima	Peringkat /Tingkat	Instansi/Lembaga	Ket
1	2	3	4	5	6
1	2019-2020	Kategori Ekonomi dalam ketepatan alokasi mengelola APBD	Terbaik ke-2 (Dua) Cluster I	Kata Data Insight Center Jakarta	Jakarta
2	2019-2020	Pembangunan Bidang Kesehatan	peringkat ke -3 (Tiga) Cluster I	Kata Data Insight Center Jakarta	Jakarta
3	2020	Keikutsertaan Dalam Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah	Apresiasi dan Penghargaan	Kementerian Riset Dan Teknologi Badan Riset Dan Inovasi Nasional Deputi Bidang Penguatan Inovasi	Jakarta
4	2020	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Penghargaan Kinerja Tinggi	Kementerian Dalam Negeri	Jakarta
5	2021	Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kota Se-Sumatera Utara	Terbaik III	Gubernur Sumatera Utara	Sumatera Utara

3.2 REALISASI ANGGARAN

Rencana kerja Bappeda Kota Sibolga adalah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) serta memuat Program, kegiatan Sub Kegiatan lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Perencanaan Anggaran merupakan tahapan awal untuk berjalannya kegiatan Pemerintah. Perencanaan Anggaran belanja menjadi instrument atau alat dalam mengevaluasi dan memonitor kinerja Pemerintah untuk mencapai Visi dan Misi yang ditujuh. adapun alokasi Anggaran APBD Pergeseran V Tahun 2024 yang di kelola Bappeda Kota Sibolga secara ringkas tersebut di bawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Program, Anggaran dan Sumber Dana
Dalam Menunjang Kinerja Bappeda Kota Sibolga

N o	Uraian	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Operasi	Rp. 6.358.380.071	Rp. 6.086.339.229	(Rp.272.040.842)
	Belanja Pegawai	Rp. 5.014.788.935	Rp. 4.730.550.070	(Rp.284.238.865)
	Belanja Barang Dan Jasa	Rp.1.343.591.136	Rp.1.355.789.157	Rp.12.198.021

N o	Program	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.5.701.958.036	Rp.5.329.919.320	(Rp. 372.038.716)
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 224.391.000	Rp. 324.389.100	99.998.100

3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 175.485.335	Rp. 175.485.335	--
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 256.545.700	Rp. 256.545.700	--
	Jumlah	Rp.6.358.380.071	Rp.6.086.339.229	(Rp. 272.040.842)

Alokasi Anggaran Strategis digunakan untuk membiayai 4 (empat) Program yang ada di Bappeda Kota Sibolga yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan ada Pengurangan Anggaran sebesar Rp. 372.038.716 hal ini dikarenakan adanya Refocusing Anggaran.

Adapun ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Tahun 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sibolga telah di alokasikan anggaran melalui APBD Pergeseran ke V Kota Sibolga TA 2024 sebesar **Rp. 6.086.339.229,-** (Enam Milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar **Rp. 4.730.550.070,-** dan Belanja Barang dan jasa sebesar **Rp.1.355.789.157,-**

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN/ANGGARAN (Rp)				INDIKATOR KINERJA		KINERJA	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA/SILPA (Rp)	%		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
5	BELANJA DAERAH	6.086.339.229	4.538.354.797	1.547.984.432	74,57%				90,96%
5.1	BELANJA OPERASI	6.086.339.229	4.538.354.797	1.547.984.432	74,57%				
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	4.730.550.070	3.592.330.523	1.138.219.547	75,94%				
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.355.789.159	946.024.274	409.764.885	69,78%				
5.01.	PERENCANAAN	5.829.793.529	4.538.354.797	1.504.836.440	77,85%				
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.329.919.320	4.006.978.832	1.322.940.488	75,18%				88,85%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.550.070	3.592.330.523	1.138.219.547	75,94%				93,75
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.550.070	3.592.330.523	1.138.219.547	75,94%	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	480 orang/bulan	450 orang/bulan	93,75
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.387.626.504	1.865.988.172	521.638.332	78,15%				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.387.626.504	1.865.988.172	521.638.332	78,15%				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	255.927.880	191.128.524	64.799.356	74,68%				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255.927.880	191.128.524	64.799.356	74,68%				
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	232.016.400	164.460.000	67.556.400	70,88%				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	232.016.400	164.460.000	67.556.400	70,88%				

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.600.000	0	129.600.000	0,00%				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.600.000	0	129.600.000	0,00%				
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.552.944	49.155.000	21.397.944	69,67%				
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.552.944	49.155.000	21.397.944	69,67%				
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	148.874.894	103.415.760	45.459.134	69,46%				
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	148.874.894	103.415.760	45.459.134	69,46%				
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	6.638.018	3.461.471	3.176.547	52,15%				
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	6.638.018	3.461.471	3.176.547	52,15%				
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.101	25.696	324.405	7,34%				
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	350.101	25.696	324.405	7,34%				
5.1.01.02	Belanja Tunjangan Penghasilan ASN	1.498.963.329	1.214.695.900	284.267.429	81,04%				
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.498.963.329	1.214.695.900	284.267.429	81,04%				
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.498.963.329	1.214.695.900	284.267.429	81,04%				
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.399.750	207.646.391	108.753.359	65,63%				100,00%

5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.193.000	3.125.500	67.500	97,89%	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%
5.1.02.0.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat listrik	3.193.000	3.125.500	67.500	97,89%				
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.497.100	48.244.600	6.252.500	88,53%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor	25.921.900	22.876.600	3.045.300	88,25%				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	25.287.700	22.453.000	2.834.700	88,79%				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	3.287.500	2.915.000	372.500	88,67%				
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.079.500	7.847.000	232.500	97,12%	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Perabot kantor	8.079.500	7.847.000	232.500	97,12%				

5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	10.948.150	9.564.500	1.383.650	87,36%	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.572.000	4.192.000	1.380.000	75,23%				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.376.150	5.372.500	3.650	99,93%				
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	32.195.000	31.852.000	343.000	98,93%				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak	32.195.000	31.852.000	343.000	98,93%				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.487.000	107.012.791	100.474.209	51,58%	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	39 laporan	39 laporan	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas Biasa	207.487.000	107.012.791	100.474.209	51,58%				
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.013.000	180.595.995	26.417.005	87,24%				100,00%
5.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.990.000	5.592.000	1.398.000	80,00%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.990.000	5.592.000	1.398.000	80,00%				
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.623.000	29.103.995	14.519.005	66,72%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.623.000	29.103.995	14.519.005	66,72%				

5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan kantor	1.200.000	1.200.000	0	100,00%				
5.1.02.02.01.0049	Belanja jasa Pencucian Pakaian, Alat kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.200.000	1.200.000	0	100,00%				
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.200.000	144.700.000	10.500.000	93,23%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	123.200.000	123.200.000	0	100,00%				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.000.000	13.000.000	0	100,00%				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.000.000	8.500.000	10.500.000	44,74%				
5.01.01.2.09	Pemerlihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.956.500	26.405.923	49.550.577	34,76%				61,67%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.156.500	18.170.923	40.985.577	30,72%	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100,00%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bakar dan Pelumas	25.686.500	10.800.000	14.886.500	42,05%				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	33.470.000	7.370.923	26.099.077	22,02%				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda dua	0	0	0	0,00%				

5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.600.000	0	2.600.000	0,00%	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	0 Unit	0,00%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.600.000		2.600.000	0,00%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	3 Unit	0	0,00%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	8.235.000	5.965.000	57,99%	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	17 Unit	85,00%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer unit Personal Computer	14.200.000	8.235.000	5.965.000	57,99%				
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	324.389.100	221.267.666	103.121.434	68,21%				100,00%
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	324.389.100	221.267.666	103.121.434	68,21 %				100,00%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	74.391.000	57.091.300	17.299.700	76,74%	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/ Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acarah	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor	2.206.100	2.062.000	144.100	93,47%				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	5.232.000	4.920.000	312.000	94,04%				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	1.307.100	1.263.900	43.200	96,69%				

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	3.445.500	2.915.000	530.500	84,60%				
5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor.Perabot kantor	1.166.000	1.090.000	76.000	93,48%				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	16.931.300	14.550.000	2.381.300	85,94%				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.400.000	500.000	900.000	35,71%				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	42.703.000	29.790.400	12.912.600	69,76%				
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	249.998.100	164.176.366	85.821.734	65,67%	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor	2.975.200	2.796.000	179.200	93,98%				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	8.952.000	8.670.000	282.000	96,85%				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	14.887.000	14.637.000	250.000	98,32%				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	8.731.000	7.290.000	1.441.000	83,50%				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.002.900	12.200.000	1.802.900	87,12%				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	18.508.000	12.400.000	6.108.000	67,00%				
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56.040.000	56.040.000	0	100,00%				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	125.902.000	50.143.366	75.758.634	39,83%				

5.01.03	Program Koordinasi Dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	175.485.109	112.982.400	78.774.518	64,38%				75,00%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90.437.009	74.165.200	32.543.618	82,01%				100,00%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.437.009	74.165.200	16.271.809	82,01%	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidan Pembangunan Manusia			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor	4.233.400	3.968.000	265.400	93,73%	Percepatan Pencapaian SDGs	1 laporan	1 Laporan	100,00%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	2.576.300	2.416.000	160.300	93,78%	Pelaporan Rencana Aksi Hak Azasi Manusia (HAM)	1 laporan	1 Laporan	100,00%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	1.829.100	1.829.100	0	100,00%	Koordinasi Ketahanan Pangan Dan Gizi	1 laporan	1 Laporan	100,00%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	5.566.700	5.171.000	395.700	92,89%	Penguatan Pengarus Utamaan Gender (PUG)	1 laporan	1 Laporan	100,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.247.509	4.515.500	1.732.009	72,28%	Koordinasi Penanggulanga n Kemiskinan Kota Sibolga	1 laporan	1 Laporan	100,00%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	69.984.000	56.265.600	13.718.400	80,40%	Kota Layak Anak,Kota sehat dan Germas	1 laporan	1 Laporan	100,00%
						Pencegahan dan Penanggulanga n Stunting	1 laporan	1 Laporan	100,00%

5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85.048.100	38.817.200	46.230.900	45,64%				100,00%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.048.100	38.817.200	46.230.900	45,64%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	7.768.400	7.527.000	241.400	96,89%				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	2.915.700	1.500.000	1.415.700	51,45%				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	3.724.000	1.455.000	2.269.000	39,07%				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	16.686.000	9.600.000	7.086.000	57,53%				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9.200.000	0	9.200.000	0,00%				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	44.754.000	18.735.200	26.018.800	41,86%				
5,05	Penelitian dan Pengembangan	256.545.700	197.125.899	59.419.801	76,84%				100,00%
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	256.545.700	197.125.899	59.419.801	76,84%				100,00%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	46.777.200	33.779.500	12.997.700	72,21%	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	46.777.200	33.779.500	12.997.700	72,21%				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor	1.511.100	1.256.000	255.100	83,12%				

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.116.500	1.080.500	36.000	96,78%				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	850.800	825.000	25.800	96,97%				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	1.395.300	1.252.000	143.300	89,73%				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.459.500	3.220.000	1.239.500	72,21%				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	37.444.000	26.146.000	11.298.000	69,83%				
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	209.768.500	163.346.399	46.422.101	77,87%				100,00%
5.05.02.201.03.012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	209.768.500	163.346.399	46.422.101	77,87%	Jumlah Dokumen hasil Penelitiandan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor	1.689.900	1.536.500	153.400	90,92%				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.790.400	1.734.000	56.400	96,85%				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	3.273.000	2.575.000	698.000	78,67%				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	3.592.200	3.291.000	301.200	91,62%				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	25.749.000	18.955.000	6.794.000	73,61%				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	34.800.000	29.034.900	5.765.100	83,43%				
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000	12.000.000	0	100,00%				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	126.874.000	94.219.999	32.654.001	74,26%				

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Sibolga Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Sibolga.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2024. Pada tahun 2024 ini Bappeda Kota Sibolga berhasil mencapai kinerja pada skala nilai Tinggi dengan rata-rata capaian Indikator kinerja Utama 77,97 % dan capaian kinerja Program dan kegiatan 90,75%. Pencapaian ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kinerja harus tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Sibolga Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, Maret 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SIBOLGA,

Drs. JUNEIDI TANJUNG, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650531 198803 1 003